



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan kelas jabatan fungsional auditor, kelas jabatan fungsional lainnya dan pemberian penghasilan kepada POKJA UKPBJ maka perlu dilakukan perubahan lampiran tambahan penghasilan pegawai, maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 88 Tahun 2022;


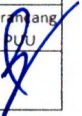
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



2. Undang-Undang 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	Perancang RUU
9	7


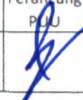
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

PARAF	
OPD	Perwakilan PUU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

PARAF	
OPD	Pertanggung Jawab
	

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239);
19. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 52).

PARAF	
OPD	Perancang RUU
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 20 April 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI						
KABID 	KEPALA  <i>Beg. urusan</i>	KABID HUKUM 	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN  <i>Hum. dan</i>	SEKDA 	WABUP 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 119 TAHUN 2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2022.


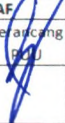
NOMINAL TARIF
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

1	TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA		
NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP
1	SEKRETARIS SKPD	12	5.235.792
2	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	12	5.312.789
3	IRBAN PADA INSPEKTORAT DAERAH	11	5.238.487
4	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DPRD	11	5.655.185
5	ESELON III B	11	4.166.978
6	ESELON IV	9	2.297.204
7	ESELON IV	8	2.280.789
8	JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN	10	2.330.120
9	JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN	9	2.297.204
10	S T A F	7	1.436.402
11	S T A F	6	1.414.646
12	S T A F	5	1.387.966
13	S T A F	4	1.384.737
14	S T A F	3	1.382.037
15	STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	1.436.402
16	STAF PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	1.414.646
17	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD MADYA	11	2.202.546
18	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD MUDA	9	2.162.074
19	PENILIK OLAH RAGA, PENILIK PLS, PENGAWAS PAUD DAN PENGAWAS TK/SD PERTAMA	8	2.135.977
20	PENGAWAS SMP MADYA	11	2.738.300
21	PENGAWAS SMP MUDA	9	2.702.593
22	PENGAWAS SMP PERTAMA	8	2.679.022
23	GURU PAMONG BELAJAR MADYA	11	1.309.622


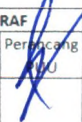
24	GURU PAMONG BELAJAR MUDA	9	1.306.253
25	GURU PAMONG BELAJAR PERTAMA	8	1.303.308
26	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	11	1.428.678
27	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	9	1.396.340
28	KEPALA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs	8	1.375.714
29	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs MADYA	11	1.250.093
30	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs MUDA	9	1.216.167
31	GURU TK/RA, SD/MI, SMP/MTs PERTAMA	8	1.194.699
32	STAF MERANGKAP PENGAJAR TK/SD DAN SMP	5	1.085.281
33	STAF TK/SD DAN SMP	7	1.081.788
34	STAF TK/SD DAN SMP	6	1.064.107
35	STAF TK/SD DAN SMP	5	1.041.981
36	STAF TK/SD DAN SMP	4	1.030.863
37	STAF TK/SD DAN SMP	3	1.179.771
38	PUSTAKAWAN MADYA/ ARSIPARIS MADYA	11	3.333.583
39	PUSTAKAWAN MUDA/ ARSIPARIS MUDA	9	2.657.549
40	PUSTAKAWAN PERTAMA/PENYELIA / ARSIPARIS PERTAMA/PENYELIA	8	2.461.804
41	PUSTAKAWAN MAHIR/ ARSIPARIS MAHIR	7	1.979.642
42	PUSTAKAWAN TERAMPIL/ ARSIPARIS TERAMPIL	6	1.954.962

2 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA


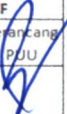
NO	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH TTP
1	SEKRETARIS DAERAH	15	24.663.322
2	ASISTEN	14	10.836.332
3	INSPEKTUR DAERAH	14	12.660.270
4	KEPALA BKD	14	11.158.204
5	KEPALA BAPERLITBANG	14	9.441.557
6	KEPALA DUKCAPIL	14	9.441.557
7	KEPALA BKPPD	14	9.441.557
8	ESELON II B	14	9.441.557
9	STAF AHLI	13	9.339.659
10	DIREKTUR RSUD	12	9.239.633
	DIREKTUR RSUD PRATAMA	12	7.699.694
11	CAMAT	12	5.774.771
12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	12	5.697.774
13	KEPALA BAGIAN ULP	12	9.239.633
14	SEKRETARIS BKD	12	7.160.715
15	SEKRETARIS BAPERLITBANG	12	5.235.792
16	KABAG KEUANGAN PADA DPRD	11	5.655.185
17	ESELON III MERANGKAP POKJA UKPBJ	11	9.226.880
18	ESELON IV MERANGKAP POKJA UKPBJ	9	7.747.432
19	ESELON IV MERANGKAP POKJA UKPBJ	8	7.602.630
20	ESELON IV LPSE UKPBJ	9	2.927.809

PARAF	
OPD	Pelaksana
	

21	JABATAN FUNGSIONAL /KOORDINATOR LPSE	10	2.951.485
22	JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN MERANGKAP VERIFIKASI KELEMBAGAAN	10	2.847.924
23	JABATAN PELAKSANA MERANGKAP POKJA	6	6.712.632
24	ESELON III PADA BKD	11	5.833.769
25	ESELON IV PADA BKD	9	3.693.543
26	ESELON IV PADA BKD	8	3.656.503
27	ESELON IV PADA BKD Selaku Satgas SPIP	9	3.918.759
28	ESELON IV PADA BKD Selaku Satgas SPIP	8	3.873.721
29	ESELON IV Selaku Satgas SPIP SKPD	9	2.702.593
30	ESELON IV Selaku Satgas SPIP SKPD	8	2.679.022
31	ESELON IV Selaku Satgas SPIP pada Inspektorat Daerah	8	2.715.225
32	KASUBID PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN	9	3.693.543
33	KASUBAG KEUANGAN Dan PERENCANAAN Pada BKD	9	3.918.759
34	BENDAHARA PENGELUARAN,PENERIMAAN, dan Pengurus Barang Pada BKD	7	2.777.043
35	BENDAHARA PENGELUARAN Pada SKPD	7	2.234.403
36	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	7	1.915.203
37	BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
38	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	7	1.979.042
39	PENGURUS BARANG SKPD	7	2.266.323
40	PENGURUS BARANG SKPD	6	2.246.790
41	PENGURUS BARANG SKPD	5	2.220.746
42	PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
43	PENGURUS BARANG PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	2.274.528
44	PEMBANTU PENGURUS BARANG	7	1.979.042
45	PEMBANTU PENGURUS BARANG	6	1.969.409
46	PEMBANTU PENGURUS BARANG	5	1.966.285
47	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	7	3.096.244
48	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	6	3.078.935
49	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD	5	3.053.526
50	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BKD	7	2.553.603
51	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BKD	6	2.551.910
52	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BKD	5	2.521.472
53	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA RSUD	11	4.524.148
54	KEPALA BAGIAN TU PADA RSUD	11	4.524.148
55	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	7	1.979.042
56	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	6	1.969.409
57	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	5	1.943.153
58	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	1.979.042
59	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	1.969.409

PARAF	
OPD	Perencana
	



60	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA INSPEKTORAT DAERAH	5	1.966.285
61	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH JABATAN FUNGSIONAL	9	3.107.981
62	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH PELAKSANA	7	2.266.323
63	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM OLEH PELAKSANA	6	2.246.790
64	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	7	2.266.323
65	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	6	2.246.790
66	FUNGSIONAL PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	5	2.220.746
67	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	7	3.032.404
68	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	6	3.023.458
69	OPERATOR APLIKASI SIMDA/SIPD SKPKD	5	3.007.260
70	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	7	3.032.404
71	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	6	3.023.458
72	OPERATOR / ADMIN APLIKASI SIPD PADA BAPERLITBANG DAN BKD	5	3.007.260
73	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	7	2.777.043
74	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	6	2.773.815
75	OPERATOR SIMDA SKPD / e-GOVERNMENT, PENERIMA SPM, HIBAH BANSOS / PENGUJI PADA BKD	5	2.752.800
76	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK , LPSE PADA SKPD	7	2.234.403
77	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK , LPSE PADA SKPD	6	2.219.052
78	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK , LPSE PADA SKPD	5	2.197.613
79	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA INSPEKTORAT DAERAH	7	2.298.243
80	OPERATOR SIMDA, SIRUP, e-GOVERNMENT, e-PROTEK PADA INSPEKTORAT DAERAH	6	2.274.528
81	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. PEMBANGUNAN	7	2.266.323
82	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. PEMBANGUNAN	6	2.246.790
83	OPERATOR e-GOVERNMENT PADA BAG. PEMBANGUNAN	5	2.220.746

PARAF	
OPD	Perancang POU
	

84	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	7	2.266.323
85	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	6	2.246.790
86	OPERATOR APLIKASI SIM ASN, OPERATOR SIAK, OPERATOR SIMCARD KENDERAAN BERMOTOR	5	2.220.746
87	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	7	1.979.042
88	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	6	1.969.409
89	PEMBANTU PENGUJI KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN	5	1.966.285
90	STAF Pada BKD	7	1.979.042
91	STAF Pada BKD	6	1.969.409
92	STAF Pada BKD	5	1.966.285
93	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	7	2.266.323
94	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	6	2.246.790
95	STAF Pada SKPD Selaku Satgas SPIP	5	2.220.746
96	KASUBAG KEUANGAN SKPD, KASUBAG PERENCANAAN DAN JF KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA SKPD ATAU JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN	9	2.702.593
97	KASUBAG KEUANGAN SKPD, KASUBAG PERENCANAAN DAN JF PERENCANA MUDA SKPD ATAU JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN	8	2.679.022
98	KASUBAG PERENCANAAN SKPD merangkap Keuangan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan PU dan JABATAN PERENCANA MUDA ITDA) ATAU YANG DISETARAKAN PADA JAFUNG	9	3.243.111
99	KASUBAG PERENCANAAN SKPD merangkap Keuangan (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan PU dan JABATAN PERENCANA ITDA) ATAU YANG DISETARKAN PADA JAFUNG	8	3.222.067
100	KASUBAG PERENCANAAN merangkap KEUANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN SKPD Lainnya	9	2.972.852
101	KASUBAG PERENCANAAN merangkap KEUANGAN DAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN SKPD Lainnya	8	2.932.443
102	KASUBAG TATA USAHA PIMPINAN DAN KEPEGAWAIAN / PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT DAERAH	10	2.744.363
103	AUDITOR MADYA PADA ITDA	12	5.543.780
104	AUDITOR MUDA PADA ITDA	10	4.712.020
105	AUDITOR PENYELIA PADA ITDA	9	4.369.191
106	AUDITOR PERTAMA PADA ITDA	8	4.489.172
107	PPUPD MADYA PADA ITDA	11	5. 476.600

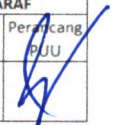
PARAF	
OPD	Perancang
8	

108	PPUPD MUDA PADA ITDA	9	4.684.494
109	PPUPD PERTAMA PADA ITDA	8	4.489.172
110	PPUPD PENYELIA PADA ITDA	8	4.344.360
111	JF PBJ MADYA	12	9.239.633
112	JF PBJ MUDA	10	8.025.968
113	JF PBJ PERTAMA	8	7.602.630
114	DOKTER UMUM MADYA PADA RSUD	12	5.158.795
115	DOKTER UMUM MUDA PADA RSUD	10	5.074.483
116	DOKTER UMUM PERTAMA PADA RSUD	9	5.044.840
117	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak MADYA	11	1.964.433
118	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak MUDA	9	1.936.858
119	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak PERTAMA/PENYELIA	8	1.918.759
120	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak / MAHIR	7	1.883.282
121	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak TERAMPIL	6	1.858.456
122	PENYULUH Pertanian, Mantri Tani dan Petugas Lapangan Peternakan, Paramedik Veteriner dan Pengawas Bibit Ternak PELAKSANA PEMULA	5	1.850.622
123	PARAMEDIS FUNGSIONAL MADYA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	11	1.488.207
124	PARAMEDIS FUNGSIONAL MUDA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	9	1.486.426
125	PARAMEDIS PERTAMA/PENYELIA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	8	1.448.120
126	PARAMEDIS MAHIR PADA RSUD DAN PUSKESMAS	7	1.436.402
127	PARAMEDIS PERTAMA LANJUTAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS	6	1.414.646
128	PARAMEDIS PELAKSANA PADA RSUD DAN PUSKESMAS	5	1.411.099
129	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	7	2.266.323
130	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	6	2.246.790
131	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/SEKDA	5	2.220.746
132	Koordinator Staf pada Bidang Pendidikan di Kecamatan	7	2.266.323
133	komandan Profos dan Satpol - PP	5	2.475.206
134	Petugas Anggota Profos pada Satpol-PP	3	1.959.773

PARAF	
OPD	Perancang PDU
	

**3 TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS**

NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	KEPALA SEKOLAH / GURU MADYA TERPENCIL	11	1.726.320
	KEPALA SEKOLAH / GURU MUDA TERPENCIL	9	1.666.599
	KEPALA SEKOLAH / GURU PERTAMA TERPENCIL	8	1.665.338
	PENJABAT KEPALA SEKOLAH TERPENCIL / STAF	7	1.436.402
	PENJABAT KEPALA SEKOLAH TERPENCIL / STAF	6	1.414.646
	PENJABAT KEPALA SEKOLAH TERPENCIL / STAF	5	1.387.966
2	GURU MADYA SEKOLAH TERPENCIL	11	1.488.207
	GURU MUDA SEKOLAH TERPENCIL	9	1.441.383
	GURU PERTAMA SEKOLAH TERPENCIL	8	1.411.917
3	STAF SEKOLAH TERPENCIL	7	1.276.802
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	6	1.275.955
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	5	1.272.302
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	4	1.165.373
	STAF SEKOLAH TERPENCIL	3	1.132.817
4	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MADYA	11	2.321.602
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MUDA	9	2.297.204
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN PENYELIA	8	2.280.789
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MAHIR	7	2.266.323
5	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MADYA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	11	2.797.828
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MUDA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	9	2.747.636
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN PENYELIA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	8	2.715.225
	KEPALA PUSKESMAS / JAFUNG KESEHATAN MAHIR (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	7	2.681.283
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS MADYA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	11	2.262.074
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS MUDA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	9	2.252.161
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS PENYELIA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	8	2.244.586
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS MAHIR (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	7	2.234.404
	STAF PUSKESMAS/PARAMEDIS PERTAMA (DAERAH SANGAT TERPENCIL)	6	2.219.052

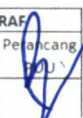
PARAF	
OPD	Perancang BUU
8	

4 **TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KELANGKAAN PROFESI**

NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	Dokter utama	14	5.179.969
	Dokter Madya	12	5.134.926
	Dokter Muda	10	5.089.883
	Dokter Pertama	9	5.044.840
2	DOKTER UMUM MADYA PADA PUSKESMAS	12	5.059.902
	DOKTER UMUM MUDA PADA PUSKESMAS	10	5.044.840
	DOKTER UMUM PERTAMA PADA PUSKESMAS	9	5.032.217
3	DOKTER GIGI MADYA PADA PUSKESMAS	12	5.059.902
	DOKTER GIGI MUDA PADA PUSKESMAS	10	5.044.840
	DOKTER GIGI PERTAMA PADA PUSKESMAS	9	5.032.217
4	DOKTER GIGI MADYA PADA RSUD	12	4.107.450
	DOKTER GIGI MUDA PADA RSUD	10	4.053.889
	DOKTER GIGI PERTAMA PADA RSUD	9	4.018.533
5	APOTEKER MADYA	11	3.154.998
	APOTEKER MUDA	9	3.107.981
	APOTEKER PERTAMA	8	3.077.255
6	MEDIK VETERINER MADYA	11	3.154.998
	MEDIK VETERINER MUDA	9	3.107.981
	MEDIK VETERINER PERTAMA	8	3.077.255

5 **TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
KONDISI KERJA**

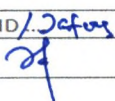
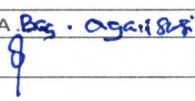
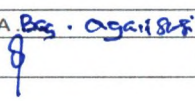
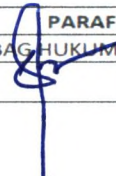
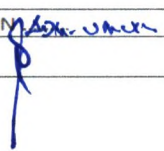

NO	JENIS JABATAN		JUMLAH TTP
1	PETUGAS RODIOGRAFER PENYELIA	8	2.244.586
	PETUGAS RODIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.234.403
	PETUGAS RODIOGRAFER PELAKSANA	6	2.219.052
2	PERAWAT/PENATA ANASTESI MADYA	11	2.262.074
	PERAWAT/PENATA ANASTESI MUDA		2.252.161

PARAF	
OPD	Perancang
8	

	PERAWAT/PENATA ANASTESI PERTAMA/PENYELIA	8	2.244.586
	PERAWAT/PENATA ANASTESI MAHIR	7	2.234.403
	PERAWAT/PENATA ANASTESI TERAMPIL	6	2.219.052
3	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN PENYELIA	8	2.244.586
	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN LANJUTAN	7	2.234.403
	LABORATORIUM/ANALIS KESEHATAN PELAKSANA	6	2.219.052
4	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA PENYELIA	8	2.244.586
	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA LANJUTAN	7	2.234.403
	PETUGAS ELEKTROMEDIS / PERAWAT/PETUGAS HEMODIALISA PELAKSANA	6	2.219.052

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. 	KEPALA  - 	KABAG. HUKUM 	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN 	SEKDA 	WABUP 